



Minta Pemerintah Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak PSTKM

● Pemda DIY Belum Terima Instruksi Soal Skema Bantuan

YOGYA, TRIBUN - Serikat buruh menilai keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang kebijakan Pengkatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) dinilai tak solutif. Selain memberikan kerugian ekonomi kepada masyarakat, PSTKM juga dianggap tak efektif untuk menekan laju penularan Covid-19.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan, menjelaskan, serikat pekerja menolak pemberlakuan kebijakan PSTKM selama dua pekan. Menurutnya, dengan memberlakukan PSTKM, pemerintah pusat maupun Gubernur DIY seperti hendak cuci tangan atas kelangsungan hidup masyarakat.

"Di mana waktu mereka (masyarakat) mencari nafkah telah dipangkas oleh kebijakan pemerintah itu sendiri," jelas Irsyad, Jumat (22/1).

Selain itu, segala upaya pembatasan untuk menangani pandemi seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ketika tak berpedoman pada UU Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah seolah-olah secara bebas tidak bertanggung jawab untuk memberikan jatah hidup atau subsidi bagi masyarakat yang terpankas waktu mencari nafkahnya dan menangan-

gung kesulitan ekonomi akibat penerapan PSTKM.

Terlebih jika dilihat dari sisi ekonomi, PSTKM telah menyebabkan setidaknya 10 toko di Malioboro gulung tikar. Kemudian di sektor pariwisata, terdapat penurunan okupansi hotel di saat peak season, yang ditargetkan sekitar 70% pada awal tahun namun dalam praktiknya hanya terealisasi sekitar 18%.

"Sementara itu PKL turut terimbas PPKM, kebijakan ini telah memukul PKL di Kawasan Malioboro dengan menurunkan omzet yang bisa mencapai sekitar 75%," jelasnya.

Irsyad melanjutkan, dari sisi pencegahan penyebaran virus Covid-19, PSTKM dinilai tidak efektif sama sekali. "Misalnya pada Kamis 21 Januari 2021 terjadi penambahan 456 kasus baru Covid-19 dan menjadi pemecahan rekor baru kasus harian COVID-19 di Yogyakarta," terangnya.

"Sebelumnya ramai diberitakan RS Covid-19 di Yogya terancam kolaps dan angka kematian akibat Covid-19 melonjak," sambungnya.

Untuk itu DPD KSPSI menuntut pemerintah untuk membatalkan perpanjangan PSTKM serta menerapkan karantina wilayah selama dua pekan dengan UU Karantina Kesehatan. Pemerintah pusat dan Pemda DIY juga harus bersama-sama mencukupi ke-

butuhan seluruh warga DIY dengan cara memberikan subsidi jatah hidup sebesar UMP DIY 2021.

"Pemda DIY perlu menegakkan hukum ketengakerjaan dan melindungi buruh dari PHK, pemotongan upah, dan dirumahkan tanpa kepastian kerja," tandasnya.

Terpisah, Sekda DIY, Kadarman Aji memahami bahwa PSTKM akan menurunkan pendapatan pelaku ekonomi. Namun, keputusan untuk memberlakukan PSTKM berada di tangan pemerintah pusat. Sehingga Pemda DIY hanya bisa mengikuti. Terlebih kasus Covid-19 di DIY belum dapat ditekan.

"Dan pasti untuk memutuskan perpanjangan atau tidak Jakarta punya hasil analisis," tandasnya.

Aji meminta masyarakat untuk menyikapi keputusan itu secara arif serta menerapkan segala aturan sehingga bisa angka konfirmasi positif benar-benar bisa ditekan. "Kemudian kalau sudah turun kita bisa melakukan aktivitas ekonomi lebih baik lagi," paparnya.

Terkait skema bantuan yang diharapkan masyarakat, Pemda DIY dikatakan belum akan merealisasikannya. "Sampai hari ini di instruksi belum tahu ya (ada bantuan). Tapi kalau saya mendengar dari OJK sudah memberikan perpanjangan relaksasi kredit sampai Juli," tandasnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005